

**NEGARA BANGSA DAN KONFLIK ETNIS:
Nasionalisme vs Etno-Nasionalisme**

*Arrochman Mardiansyah**

Abstract

Ethnic conflicts are rooted from the way nation state deals with ethno-nationalism. The disregard of ethno-nationalism in Indonesia helps us in explaining the current influx of ethnic conflicts.

Kata-kata kunci: Negara bangsa; Konflik Etnis; Nasionalisme; Etno-Nasionalisme.

Perkembangan dan pengalaman politik global dalam dua dekade terakhir ini melahirkan fenomena yang dikenal dengan "global paradoks". Di satu sisi terjadi penyatuan, standarisasi - bahkan mungkin uniformitas - dan sekaligus sentralisasi pada level global aspek-aspek politik, ekonomi sosial, dan budaya; yang dulunya diandaikan sebagai sebuah negara bangsa dan batas-batas imajiner dari kekuasaan nasional. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, dari dalam negara bangsa dan nasionalisme, bangkit kembali kesadaran politik etnik (etno-nasionalisme) yang mengandung keunikan, originalitas, kecil sebagai fondasi baru bagi sebuah pengaturan politik yang "adil" dan "absah". Negara bangsa dan nasionalisme terjepit di antara keduanya.

Berakhirnya perang dingin, yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989, telah melahirkan eforia kemenangan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal atas dua

* *Arrochman Mardiansyah* adalah staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

saingan utamanya yaitu komunisme dan nasionalisme fasis. Virus demokratisasi pun menyebar. Dunia memasuki era globalisasi secara lebih masif, yang menjadikannya sebuah "kampung besar". Tiap negara terintegrasi ke dalam ekonomi pasar dan satu sama lain semakin mengalami ketergantungan ekonomi.

Euforia kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal tersebut telah mendorong Francis Fukuyama menegaskannya sebagai *the end of history*.¹ Persaingan ideologis antara bangsa-bangsa di dunia, seperti antara Timur - Barat, Islam-Konfusius dan Barat-Kristen yang diprediksikan oleh Huntington², juga akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal.

Namun demikian, berakhirnya ketegangan ideologis tersebut ternyata tidak lantas menjadikan dunia lebih aman karena hal tersebut hanya mengurangi ketegangan di tingkat global, tidak menyelesaikan konflik-konflik di kawasan yang telah memiliki bibit-bibit konflik secara tradisional. Hal ini terbukti ketika dunia memasuki dekade 1990-an muncul berbagai konflik bersenjata di dunia. Mulai dari konflik tradisional yang kembali muncul ke permukaan - Burundi, Rwanda -, sampai dengan konflik baru, seperti konflik bersenjata antar-etnis di bekas negara Yugoslavia. Ternyata, perubahan yang begitu cepat telah menciptakan *socio-political shock*, sehingga hal ini membenarkan tesis yang dikemukakan oleh James Rosenau bahwa " semakin cepat tingkat perubahan sosial terjadi, semakin memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan *intra-societal*".³

Bukan itu saja, sifat dan hakekat konflik itu pun telah berubah. Konflik bukan lagi berlangsung antar-negara, melainkan terjadi dalam suatu negara. Tujuan konflik juga merambah segmen lain, bukan lagi didominasi perebutan wilayah (*teritorial aims*), melainkan keunggulan etnis (*ethnic aims*).

Orang bertanya-tanya dan tidak habis mengerti, bagaimana bisa masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok atau etnis dan hidup secara damai bertahun-tahun dalam satu negara, tiba-tiba menjadi

¹ Lihat Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* Penerjemah: Mohammad Husein Amrullah, Qalam, Yogyakarta, 2001.

² Lihat Samuel P. Huntington, *Benturan Antar-Peradaban dan Politik Masa Depan Dunia*, Penerjemah M. Sadat Ismail, Qalam, Yogyakarta, 2000.

³ KOMPAS, 20 Desember 2000.

beringas dan saling bunuh? Dan pada saat itu, tidak ada seorang pun di Indonesia yang menyangka dan membayangkan bahwa konflik serupa - baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal atau gabungan keduanya -⁴ bisa terjadi di sini. Karena, meskipun rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan; toleransi di antara suku, agama, ras dan golongan tersebut sudah berlangsung ratusan tahun, jauh sebelum republik ini diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Namun, sejarah mencatat bahwa dalam dekade terakhir abad XX, bangsa ini dihentakkan dengan berbagai kerusuhan, mulai dari Situbondo sampai Sampit. Selain itu, bangsa ini juga mengalami konflik yang akut berkenaan dengan keinginan sekelompok masyarakat di Papua (Irian Jaya) dan Aceh yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Masyarakat Papua menumbuhkembangkan apa yang disebut "nasionalisme Papua" karena secara etnis mereka menganggap dirinya sangat berbeda dengan rakyat Indonesia lainnya. Mereka termasuk kedalam rumpun etnis Melanesia. Sementara Aceh, memunculkan isu penjajahan oleh "kaphe Jawa"⁵ untuk memberi legitimasi terhadap perjuangannya untuk memisahkan diri. Di kedua daerah ini, perlawanan sudah memasuki tahap yang berbahaya karena menggunakan kekerasan bersenjata.

Sementara itu, seiring dengan angin reformasi yang bertiup, runtuhnya rezim Soeharto dan diberlakukannya otonomi daerah telah menimbulkan keinginan di beberapa daerah untuk juga memisahkan diri - minimal menuntut diberlakukannya sistem federal - seperti yang berkumandang di Kalimantan Timur dan Riau.

Jika kita amati, konflik yang timbul di Papua dan Aceh maka dimensi konflik vertikal dan horizontal sangatlah terasa. Para pendatang diintimidasi dan diusir dari tanah Papua dan Aceh. Sementara di Kalimantan Timur dan Riau, tampaknya konflik yang

⁴ Terminologi konflik vertikal digunakan untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara warga negara (rakyat) dengan pemerintah (negara); sedangkan konflik horizontal mengacu pada konflik antar-sesama warga negara (rakyat). Namun, kenyataannya seringkali pada sebuah konflik yang terjadi, kedua dimensi konflik ini hadir secara bersamaan sehingga tidak bisa dibedakan secara tegas.

⁵ Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1999, hal.225.

berdimensi vertikal lebih mengemuka berkenaan dengan keinginan mereka untuk memisahkan diri. Meskipun baru sebatas wacana; bukan tidak mungkin jika dibiarkan berlarut-larut maka konflik yang terjadi akan berkembang ke arah yang lebih buruk lagi.

Berbagai fenomena yang merebak tersebut memunculkan berbagai pertanyaan : Mengapa konflik yang mengusung isu-isu primordialitas tersebut terjadi? Bagaimana solusinya ? Tulisan ini tidak berpretensi untuk bisa menjawab semuanya secara lugas, tetapi akan menelusuri mengapa konflik tersebut muncul seiring dengan meningkatnya sentimen primordial yang membangkitkan isu "etno-nasionalisme" dalam sebuah negara bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme.

Konsep Etnis

Dari sudut pandang etimologis, etnis berasal dari bahasa Yunani "ethnos" yang berarti "penyembahan" atau "pemuja berhala". Di Inggris, terminologi ini digunakan mulai pertengahan abad XIV yang dalam perjalanannya mengalami reduksi ke arah penyebutan karakter ras. Di Amerika Serikat, terminologi ini digunakan secara masif pada saat Perang Dunia I sebagai penghalus penyebutan bangsa-bangsa yang dianggap inferior, seperti Yahudi, Italia dan Irish. Terminologi ini dalam keseharian biasanya dikaitkan dengan isu minoritas dan hubungan kesukuan. Wacana ini berkembang dengan kecenderungan membicarakannya dalam konteks sebuah unit sub-nasional.

Bagi seorang Donald L. Horowitz,⁶ terminologi etnis berkaitan erat dengan kelahiran dan darah, walaupun tidak selalu demikian. "Keaslian" individu sangat diperhitungkan, tetapi tidak menutup adanya perkecualian. Identitas etnis relatif sulit untuk diubah, walaupun bisa saja terjadi. Oleh karenanya, identitas etnis adalah berdasarkan kesamaan darah (kelahiran) bagi sebagian besar anggotanya. Dalam konteks sosiologi, etnis adalah status yang ditentukan (*ascribed status*). Namun demikian, beberapa variasi tetap dapat dihadirkan karena etnis juga mengacu pada kesamaan kepercayaan. Dengan memperhitungkan adanya disparitas antara ciri-

⁶ Donald L. Horowitz, *Ethnic Group in Conflict*, University of California Press, Los Angeles, 1985, hal. 52-53

ciri fisik dan konsepsi kelompok maka pengertian etnisitas menjadi elastis. Menurut Horowitz, sebuah kelompok etnis dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa dan kepercayaan (*religion*), yang mencakup "suku", "ras", "nasionalitas" dan "kasta".

Konflik Etnis

Terjadinya konflik etnis di negara-negara berkembang, menurut Horowitz, berkaitan erat dengan berlangsungnya modernisasi. Bagi Horowitz, konflik antar-etnis terjadi karena adanya ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh berbagai etnis dengan dilakukannya modernisasi. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sektor modern adalah sebab utama mengapa konflik antar-etnis seringkali terjadi.

Konflik antar-etnis dalam sebuah negara bisa terjadi karena pemetaan atau pembagian wilayah yang dilakukan oleh kolonialis tanpa melihat kepentingan kultural. Akibatnya, bangsa yang sama dan semula satu menjadi terpisah-pisah dan tergabung dengan bangsa lain yang asing dengan kultur mereka, bahkan bertentangan dan kemudian terjebak dalam konflik yang permanen.

Namun bukan jawaban yang bermakna jika kemudian negara dibiarkan tercerai berai hanya karena berdasarkan asumsi sejarah dan pesimisme multi-etnis. Beberapa pendapat masih melihat adanya kemungkinan eksistensi negara multi-etnis. Optimisme tersebut didasarkan pada beberapa kemungkinan untuk melakukan regulasi konflik etnis yang tersedia, yaitu : *Pertama*; partisi yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lain. Model ini jarang sekali digunakan, terjadi hanya jika sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara. *Kedua*; adalah dominasi satu etnis terhadap etnis lain., biasanya melalui kekerasan atau tindakan diskriminatif. *Ketiga*; melalui proses asimilasi. Model ini adalah bentuk yang halus dan maju dari model kedua, namun dilakukan dengan cara yang alami. *Keempat*; konsolidasi. Model ini mengakui eksistensi setiap perbedaan yang ada dan mencoba mengharmonikan perbedaan-perbedaan itu. Dalam model ini kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan

⁷ *Ibid*, hal. 101

dalam berbagai hal, tetapi diputuskan berdasarkan kompromi. *Kelima*, memiliki persamaan dengan model keempat, yaitu pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini mungkin lebih tepat disebut sinkretisme. Negara, dalam hal ini, berusaha mengakomodasi dan mengapresiasi berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan diperlakukan secara adil. Dalam model yang kelima ini, upaya peredusiran konflik dilakukan melalui desentralisasi kekuasaan (sistem federasi) atau otonomi kultural.

Kebangsaan dan Negara Bangsa

Kata "bangsa" berasal dari bahasa latin "*nasci*", yang artinya "dilahirkan".⁸ Apakah "bangsa" itu? Para ahli tidak pernah berhasil menyepakati definisi "bangsa". Pernyataan yang paling sederhana – menurut Emerson – bangsa adalah "satu badan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang merasa mereka itu merupakan suatu bangsa". Oleh karenanya, diskursus mengenai "bangsa" ini lebih sering diarahkan pada proses terbentuknya sebuah bangsa; mempertanyakan; mengapa kelompok orang bergabung menjadi "bangsa".

Dalam literatur modern, konsepsi tentang bangsa dan komitmen kebangsaan dipilah dalam dua pengertian: kebangsaan dalam pengertian politik (*political nation*), dan dalam pengertian kultural (*cultural nation*). Dalam pengertian politik, kebangsaan bersifat *voluntaristik*. Komitmen pada kebangsaan ditentukan oleh kehendak para individu. Apakah seseorang akan menjadi warga suatu negara atau tidak, tergantung pada pilihan pribadi. Pilihan itu ditentukan oleh faktor-faktor subyektif dan politis. Dalam pengertian kultural, kebangsaan bersifat deterministik. Menjadi warga suatu negara bukanlah sebuah pilihan, tetapi ditentukan oleh alam dan sejarah. Komitmen kebangsaan ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor obyektif dan kultural. Menurut Harold R Isaacs,¹¹ bangsa harus dilihat

⁸ Harold R. Isaacs, *Pemujaan Terhadap kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 228.

⁹ *Ibid*, hal 228 - 234.

¹⁰ Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*, Harper & Row Publisher, New York, 1971, hal. 193 - 198

¹¹ Harold R. Isaacs, *Op. Cit*, hal. 229

sebagai masyarakat yang membuat pendekatan yang paling dekat untuk merangkul semua aspek kehidupan mereka.

Ben Anderson menyatakan bahwa salah satu sebab mengapa ikatan kebangsaan demikian kuat adalah adanya akar kultural yang mendekati religius, yang menopang komunitas tersebut. Kebangsaan menawarkan kontinuitas di hadapan diskontinuitas. Bangsa-bangsa selalu membayangkan secara samar-samar suatu masa lalu yang tak terlupakan, dan bahkan meluncurkan masa depan yang tak terbatas. Selain itu, fakta berbicara bahwa faktor utama kebangkitan kebangsaan sebagai kekuatan kultural yang besar sejak awal abad XX adalah pudarnya dua bentuk komunitas imajiner lainnya, yaitu komunitas agama dan kerajaan.¹²

Menurut Ben Anderson, seiring dengan pudarnya dua komunitas imajiner tersebut berkembanglah apa yang disebut sebagai "*print capitalism*", sebuah konsekuensi dari perkembangan dunia kapitalisme yang memungkinkan apa yang disebut sebagai *imagined community* terbentuk. Negara bangsa – serta nasionalisme – sebagai bentuk konkretnya, adalah sebuah produk peradaban yang baru, yang tidak bisa ditemukan presendennya di masa lalu.

Negara bangsa merupakan point penting di dalam politik domestik dan hubungan internasional di dunia modern. Negara bangsa adalah pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan dan rakyatnya. Rakyat memandang negara bangsa sebagai pembuat, pemaksa dan pihak yang menginterpretasikan hukum. Negara bangsa adalah kulminasi unit-unit politik dan entitas yang legal untuk melindungi dan mempertahankan penduduk dan wilayah mereka.¹³

Dengan demikian, tidak mengherankan jika begitu menjadi negara bangsa, kebangsaan tidak lagi merupakan fakta psikologis atau mental yang bersifat subjektif dan karenanya lunak semata; melainkan menjadi fakta material yang objektif dan karenanya keras, yang mengatasi subjektifitas manusia pendukungnya. Objektifitas kebangsaan itu disahkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-

¹² Faruk HT., "Imajinasi, Reimajinasi dan Deimajinasi: Soal Negara – Bangsa dan Kita," dalam TH. Sumartana (eds), *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 67 - 69.

¹³ Frank N. Magill (ed), *International Encyclopedia of Government and Politics*, Toppan Company PTE LTD, Singapore, 1996, hal. 854

undangan yang mempunyai kekuatan memaksa, mengandung sanksi-sanksi yang dilaksanakan oleh aparat negara. Pada saat yang sama, apa yang semula merupakan moment historis belaka, yaitu pembangunan konsensus mengenai ideologi bangsa, berubah menjadi universal. Apa yang disebut kebangsaan bukan lagi soal pembangunan imajinasi, melainkan pula soal monitoring dan kontrol atas pelaksanaannya.

Tidak bisa dipungkiri jika abad XX merupakan abad yang monumental bagi kedigjayaan konsep dan praksis negara bangsa dan nasionalisme-nya. Pada awal perkembangannya, "pengalaman sejarah bersama, cita-cita masa depan bersama dan ikatan geo-politis yang satu" menjadi dasar utama yang menopang kehadiran dan kontinuitas keduanya. "Pengalaman bersama" diekspresikan dengan cara yang bervariasi, mulai dari yang bersifat positif seperti pengembaraan jauh ke masa lalu, bahkan lewat pengembangan mitos bersama, hingga pada yang bersifat negatif, yang sering dirumuskan sebagai "musuh bersama". Sementara "cita-cita bersama" dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai "good society" yang diidealisasikan. Faktor geopolitik menjadi "ruang", baik konkrit maupun imajiner yang menghubungkan masa lalu dan masa depan di atas ke dalam kesatuan masa kini.

Persoalannya menjadi pelik ketika negara bangsa dengan nasionalismenya hadir dalam wujudnya sebagai sebuah negara yang majemuk.¹⁴ Tidak dapat dipungkiri jika hidup dalam suatu negara yang majemuk dengan beragam etnis menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks.

Kemajemukan masyarakat tersebut merupakan faktor yang sangat diperhitungkan pada saat awal berdirinya negara dan pada masa perkembangannya. Elemen kemajemukan ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Beertz¹⁵ sebagai *primordial sentiment*, lawan dari *civil politics*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku pada suku (*tribe*), daerah (*region*), agama,

¹⁴ Konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Furnivall ini digunakan untuk menjelaskan keunikan masyarakat Indonesia yang ditandai pembilahan baik secara horizontal (perbedaan suku-bangsa, agama, kedaerahan) maupun secara vertikal (perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah). Lihat Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 28

¹⁵ Alfian, *Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 13

kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat "given". Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan *inherent*. Dalam ikatan-ikatan sosial semacam ini, kehidupan kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara kekuasaan dan identitas pribadi atau kelompok dilihat sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak menentukan. Keadaan demikian ini kontras sekali dengan *civil politics* yang memandang penting kinerja (*performance*) dan prestasi (*merit*).

Suatu masyarakat bangsa yang sarat dengan *primordial sentiment* semacam ini, menurut Geertz, memerlukan suatu *integrative revolution* yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas, yang mendukung pemerintahan nasional. Tanpa adanya gerak integrasi semacam ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan, akan meningkatkan potensi meledaknya *disintegrasi politik*.

Integrative revolution tersebut sebenarnya termasuk dalam proses yang dikenal dengan *nation building*,¹⁶ yang merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latar belakang etnik, agama atau pun budayanya, mereka adalah satu bangsa, yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu *nation state*.

Dalam konteks *nation building* ini, persoalan seputar etnisitas harus mendapatkan perhatian seiring dengan perkembangan nasionalisme karena *nation building* tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan nasionalisme. Sedangkan sasaran nasionalisme adalah lebih dari sekedar penyebaran kesadaran berbangsa melainkan terbentuknya suatu *nation state* yang akan menjadi wahana politik untuk mewujudkan tercapainya masa depan yang lebih baik bagi seluruh komponen bangsa, tanpa memandang perbedaan etnis.

Proses *nation-building* ini memang tidaklah mudah karena sekaligus juga harus memberikan kesejahteraan material, di samping

¹⁶ Saafroedin Bahar, "Sumbangan Daerah Dalam Proses Nation Building", dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (eds), *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2000, hal. 161 - 162.

pemenuhan dimensi sosial-psikologis berupa identitas nasional yang positif dan membanggakan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi dan identitas kultural asalnya. Kesulitan ini sebenarnya selalu mengemuka pada suatu bangsa yang dibentuk berangkat dari suatu kondisi yang *multi-nation* sekaligus arena pertemuan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Kegagalan dalam pengelolaan kepentingan membuat pihak tertentu mempertimbangkan kembali keikutsertaannya. Perasaan tidak puas yang muncul atas distribusi "kesejahteraan material" akan membuat para anggotanya kehilangan daya tarik karena dirasakan negara bangsa ini tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap dirinya; apalagi jika ini diperparah dengan semakin menyuruaknya perasaan tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh penguasa.

Nasionalisme

Nasionalisme biasanya dibahas dalam ranah gagasan/idea dan kebijakan/struktural.¹⁷ Pada ranah gagasan, nasionalisme dianalisis sebagai *state of mind* atau perwujudan kesadaran nasional dari para individu anggota suatu bangsa. Anderson mengungkapkan hal ini dengan istilah *imagined political community*, artinya persoalan penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka. Seorang Turner mengkaitkan konsep nasionalisme dengan fenomena *citizenship*. Nasionalisme dipahami sebagai persoalan pengembangan hak warga negara, yaitu penggalakan partisipasi sosial penduduk dalam suatu komunitas sebagai anggota yang sah dengan hak legal yang penuh. Dengan kata lain, nasionalisme merupakan program penciptaan *citizenship*.

Oleh karenanya keabsahan nasionalisme menemukan alasan yang lebih bersifat kualitatif ke dalam dengan adanya prinsip "*citizenship*" ini. Prinsip ini memiliki daya reduksi yang sangat besar dalam memenuhi hasrat setiap komunitas atas "persamaan". Dalam perkembangannya, prinsip kewarganegaraan mengalami proses

¹⁷ Mochtar Mas' oed, "Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini", dalam Ichlasul Amal & Armaidy Armawi, *Ibid.*, hal 192 - 197

pertumbuhan yang luar biasa sehingga dimaknai sebagai "jantung" dari konsep nasionalisme.

Pada ranah struktural/kebijakan, nasionalisme dipahami sebagai suatu bentuk perpolitikan, suatu strategi politik. Dalam pengertian kedua ini, nasionalisme merupakan bagian dari fenomena politik. Karena politik adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan selalu dikaitkan dengan persoalan pengendalian negara, maka nasionalisme selalu berkenaan dengan persoalan memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara. Dengan kata lain, nasionalisme didefinisikan sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen-argumen nasionalis.

Argumen nasionalis yang dipakai sebagai pembenar itu pada dasarnya, menurut Breuilly¹⁸, adalah doktrin politik yang memuat tiga pernyataan dasar: *Pertama*, pernyataan yang menegaskan eksistensi suatu bangsa dengan karakter yang jelas dan khas. *Kedua*, pernyataan yang meneguhkan bahwa kepentingan dan nilai bangsa ini lebih utama daripada nilai-nilai lain, baik yang datang dari kelompok-kelompok sempit dalam negeri maupun kepentingan supra-nasional. *Ketiga*, argumen bahwa bangsa yang bersangkutan harus merdeka dan untuk itu bangsa tersebut paling tidak harus memiliki kedaulatan politik.

Sebagai suatu konsep politik, nasionalisme - yang umumnya dipandang lahir dalam abad XVIII bersamaan dengan meletusnya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789 - pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah entitas politik baru, baik dengan cara memisahkan diri dari satu entitas politik lama atau menggabungkan beberapa entitas politik yang telah ada sebelumnya. Cepat atau lambat, para *nation-builders* akan menghadapi reaksi dari entitas politik lama yang merasa dirugikan. Jika dilihat dalam konteks dunia ketiga, sejarah perkembangan nasionalisme senantiasa sebagai *counter-ideologi* kolonialisme, sebagai ideologi yang bertujuan memperjuangkan kebebasan untuk membangun negara bangsa yang mencakup komunitas multi-etnis sebagai kesatuan serta bereksistensi secara mandiri yang mencakup kesamaan, demokrasi, kepribadian nasional dan prestasi kolektif.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 197

Secara umum, nasionalisme sebagai landasan dasar berdirinya *nation state* masih tetap relevan. Namun tidak dapat dikesampingkan begitu saja rasa kecewa rakyat terhadap kinerja negara. Rasa kecewa yang ringan akan diekspresikan dalam bentuk yang lunak dan disalurkan melalui proses politik yang biasa. Akan tetapi rasa kecewa yang berat serta berkepanjangan akan diekspresikan dalam bentuk yang keras dan melalui gejolak-gejolak politik dan keamanan, yang dapat membahayakan eksistensi negara bangsa itu sendiri. Jika rasa kecewa yang bersifat endemis tersebut dikristalisasi serta dimanipulasikan oleh para pemimpin etnis tersebut maka hasilnya sangat mungkin merupakan gerakan separatisme.

Hal ini dikarenakan nasionalisme, di satu sisi mengikat sebagian umat manusia dengan tali solidaritas yang baru, tetapi di sisi lain ia menciptakan atau mempertegas garis pemisah antara *imagined community* yang baru dengan siapa saja yang dikhayalkan berada di luar batasnya.

Hanya dalam bentuk sebagai tali solidaritas ini, nasionalisme bisa diharapkan memainkan peranan positif. Bisakah kita mengkhayalkan suatu perkembangan ke arah suatu dunia negara bangsa, yang masing-masing secara intern diikat oleh solidaritas nasionalisme, tanpa menghapuskan keragaman budaya yang ada, dan secara ekstern bekerja sama dalam lembaga multilateral baik regional maupun global untuk menangani masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam batas-batas negara bangsa.

Celakanya, perkembangan nasionalisme di panggung dunia, terutama sejak berakhirnya perang dingin lebih menonjolkan muka nasionalisme yang mengerikan sebagai pemisah, yang sanggup membubarkan negara-negara bangsa. Di era golablisasi ini berkembang diskursus tentang etno-nasionalisme, hypernasionalisme, *turmoil among nation* dan perbenturan peradaban.

Etno-Nasionalisme

Etno-nasionalisme merupakan paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, ras) sebagai basisnya. Apa yang tadinya

bernama etnisitas atau pun semangat etnosentrisme ingin diwujudkan ke dalam suatu entitas politik yang bernama negara bangsa (*nation state*). Ada usaha homogenisasi pengertian bangsa dalam hal ini, yaitu pengertian bangsa lebih diperkecil kepada ikatan perasaan sesuku yang ditandai dengan kesamaan bahasa, budaya atau kesetiaan pada suatu teritorialitas tertentu. Etno-nasionalisme seringkali diberikan pula kepada "gerakan nasionalis". Dari sudut pandang etnis yang eksis di suatu negara, konsensus gerakan etno-nasionalisme ini secara fundamental terletak pada masalah politik dan emosional daripada ekonomi serta dipandang pula gerakan yang melibatkan massa.²⁰

Sebenarnya, dalam etno-nasionalisme ada kehendak untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu, yang secara ekonomi, politik dan kultural merasa merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang erat. Masalahnya adalah bibit nasionalisme itu tidak lagi diletakkan dalam konteks *nation state* yang lebih luas, meskipun secara yuridis konstitusional merupakan wilayah dari negara bangsa tersebut.

Pesimisme mengenai etno-nasionalisme di negara-negara dunia ketiga didasarkan atas pandangan bahwa negara-negara tersebut merupakan *accidental state* dengan batas-batas yang ditinggalkan dari peta-peta kolonial yang tidak menghiraukan gejala-gejala etnisitas. Negara-negara yang artifisial dan biasanya otoriter pasti berbenturan dengan etno-nasionalisme kelompok yang tertindas. Hal ini mengakibatkan *turmoil* antara bangsa-bangsa di dalam negara-negara yang gagal.

Dalam konteks kebangsaan yang lebih besar (negara bangsa), gejala etno-nasionalisme ini dapat pula dipandang sebagai pendefinisian rasa kebangsaan kepada ikatan-ikatan yang lebih primordialistik (etnik). Atau dapat juga dipandang sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Karenanya, secara psikologis, gejala disintegrasi bangsa - dengan basis pengertian etno-nasionalisme - dapat pula dipandang sebagai fenomena "keluar-masuk" kelompok (*group formation-dissolution*).²¹

¹⁹ Lance Castles, "Nasionalisme Kontemporer dan Relevansi Bagi Indonesia," dalam Ichlasul Amal & Armaid Armawi, *Ibid*, hal. 36

²⁰ Frank N. Magill (ed), *Op.Cit.* hal. 875

²¹ *KOMPAS*, 22 November 2000.

Dalam hal ini, pertanyaan yang mengemuka adalah kondisi sosio-psikis apa yang mendasari kelompok untuk keluar dan masuk dalam konfigurasi suatu kelompok yang lebih besar (bangsa)? Mengapa ada kelompok etnis yang merasa perlu menjelmakan sentimen etnis menjadi sebuah *nation*? Mengapa ada kelompok etnis yang menerima tetap tinggal sebagai konsep etnisitas; tidak perlu menjadi *nation* tersendiri?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut harus lebih menitik pada persoalan manusia yang paling mendasar yaitu soal pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar. Mengapa seseorang tertarik masuk suatu kelompok? Secara psikologis, orang/sekelompok orang tertarik masuk kelompok karena didasari faktor-faktor: *pertama*, adanya kesamaan (*similarity*). *Kedua*; perasaan senasib (*common fate*). *Ketiga*; adanya kedekatan baik fisik maupun psikologis (*proximity*). *Keempat*; merasa mendapat ancaman dari musuh (*shared threat*) dan *kelima*; motif-motif lain yang bersifat utilitarian, keuntungan bersama, pencapaian tujuan bersama.

Tafhel dan Turner menyatakan bahwa prinsip yang amat mendasar bagi suatu kelompok sosial untuk masuk dan keluar dari suatu kelompok adalah motivasi untuk mendapatkan evaluasi diri yang positif dari keanggotaannya pada suatu kelompok sosial. Dengan demikian, adanya perasaan "bangga" atas identitas nasional itulah menjadi pengikat dan motif seseorang untuk bergabung ke dalam suatu kelompok.

Bagaimana halnya jika seseorang ingin keluar dari keanggotaannya dalam suatu kelompok; misalnya ketika ia merasa kelompoknya tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap identitas sosialnya? Tafjel mengindikasikan modus meninggalkan kelompoknya secara simbolis dengan jalan menganggap dirinya secara psikologis "bukan bagian dari kelompok tersebut" atau proses disosiasi diri. Modus lain yang lebih konstruktif adalah melakukan reinterpretasi terhadap ciri-ciri kelompok yang ditolak. Sekali lagi motivasi ini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan identitas sosial yang positif dari keanggotaannya pada suatu kelompok (baca: bangsa). Kemungkinan meninggalkan kelompok secara nyata-nyata tanpa mendapatkan identitas pengganti (*alternate identity*) akan membawa konsekuensi psikologis yang tidak menyenangkan, yaitu perasaan termaginalisasi atau juga teralienasi.

Dengan demikian, substansi masalah yang terkandung dalam upaya menangkal serta menanggulangi masalah munculnya etno-nasionalisme ini adalah bagaimana mengatur tatanan kenegaraan bangsa di atas komunitas tradisional yang sudah ada sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari kelompok yang lebih luas (negara bangsa). Hal ini dikarenakan, walaupun konsep negara bangsa menganggap adanya dukungan rakyat terhadap negara bangsa yang mungkin didirikannya sendiri, dukungan tersebut bukanlah sesuatu hal yang terjadi dengan sendirinya. Rakyat tidak demikian saja memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara. Negara bukan merupakan satu-satunya sasaran loyalitas rakyat. Walau negara bangsa telah ada dan berfungsi, rakyat masih tetap memelihara kesetiiaannya terhadap komunitas politik pra-negara bangsa yang tersebar di seluruh daerah.

Nasionalisme dan Etno-Nasionalisme di Indonesia

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa, juga mempunyai obsesi dengan nasionalisme. Soekarno mempunyai gagasan nasionalisme sebagai sebuah ideologi bangsa yang diabdikan untuk proyek *nation building*. Soekarno menyatakan bahwa membangun rasa kebangsaan harus dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan "suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu dorongan, satu bangsa". Lebih lanjut, Soekarno dengan mengutip Ernest Renan, menyatakan bahwa keberadaan suatu bangsa hanya mungkin apabila rakyat mempunyai suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi karena: *pertama*, rakyat itu dulunya menjalani satu riwayat; *kedua*, rakyat itu sekarang harus memiliki kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu.²² Dalam kaitannya dengan nasionalisme, bangsa - menurut Soekarno - lebih didasarkan pada nasionalisme yang longgar, luhur; nasionalisme yang mementingkan kesejahteraan manusia Indonesia, dan yang mengutamakan persahabatan dengan semua kelompok.²³

²² Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1964, hal. 3.

²³ *Ibid*, hal 510.

Muhammad Hatta juga mempunyai gagasan tentang nasionalisme. Berbeda dengan Soekarno, Hatta ingin melakukan *state building* dengan memanfaatkan *nation state* yang ditinggalkan oleh kaum kolonial dan mau diatur dengan cara-cara konstitusional.

Berbeda dengan kedua *founding fathers* tersebut, rezim Soeharto agak sulit untuk dikatakan memiliki nasionalisme atau lebih tepatnya; kita akan kesulitan untuk mendefinisikan nasionalisme versi rezim Soeharto. Memang ada keinginan untuk tetap mempertahankan sebuah identitas yang dicari jauh ke masa lampau pada masa "kerajaan nasional" semisal Sriwijaya dan Majapahit. Dengan demikian, ada upaya untuk mendapatkan dasar penjelasan yang bersifat kultural bagi gagasan nasionalisme. Akan tetapi dalam praktek, sebetulnya, rezim Soeharto tidak menganut nasionalisme yang bisa disandingkan dengan nasionalisme versi Soekarno maupun Hatta. Rocky Gerung²⁴ menyatakan bahwa nasionalisme rezim Soeharto tidak lebih sebagai peralatan politik, semacam "kotak politik", yang dibawa kesana kemari. "Kotak politik" yang di dalamnya ada Pancasila, dwi fungsi ABRI (TNI), P-4, konsepsi negara integralistik dan sebagainya. Semuanya digunakan untuk memperbaiki, merawat dan memaksimalkan *performance* mesin politik rezim Soeharto.

Jika kita melakukan kilas balik sejarah terbentuknya republik ini maka pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah apakah masyarakat etnik dengan latar belakang sejarah, budaya dan politik yang berbeda-beda merasakan kelahiran negara modern sebagai bagian integral mereka? Dalam perspektif pengalaman bangsa Indonesia, di mana negara tegak di atas kelompok-kelompok etnis yang beragam, menjawab pertanyaan tersebut sangatlah penting.

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa yang multi-etnis, sudah sejak awal mengandung masalah legitimasi kultural. Hal ini terjadi karena negara Indonesia lahir secara tiba-tiba melalui revolusi politik nasional. Revolusi ini memang menyertakan seluruh wilayah dan berbagai kelompok etnis. Namun, partisipasi mereka lebih merupakan reaksi spontan daripada tindakan yang terorganisir. Jalannya revolusi di setiap daerah bersifat otonom, tanpa dikoordinasikan oleh pemimpin yang

²⁴ Rocky Gerung, "Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme," dalam Th. Sumartana dkk (eds), *Op.Cit*, hal. 15

berada di pusat. Akibatnya, kehadiran negara di Indonesia merupakan sebuah hasil kolektif hampir seluruh daerah dan kelompok etnis yang ada. Keadaan ini secara keseluruhan telah menciptakan status yang sama di antara daerah-daerah yang terlibat di dalam revolusi sehingga hubungan daerah-daerah tersebut pada dasarnya berbentuk kolegial daripada *superior - subordinat*.

Menyimak peristiwa revolusi nasional dan penciptaan negara bangsa Indonesia, maka terdapat dua hal yang dapat diidentifikasi dalam konteks tersebut, yaitu revolusi nasional telah menciptakan hubungan yang setara antar-berbagai daerah dan Daerah dengan Pemerintah Pusat; serta revolusi nasional juga telah menciptakan para pemimpin dan pahlawan mereka sendiri di setiap daerah. Mereka ini, yang berakar pada masing-masing daerah, merupakan para tokoh asli daerah dan muncul sebagai pemimpin di kampung halamannya. Terutama oleh faktor budaya dan agama, para pemimpin tersebut memperoleh dukungan besar dari masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan para pemimpin daerah ini sepenuhnya bertumpu pada sumber daya daerah mereka sendiri dan tidak banyak dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan dari luar.

Persoalannya adalah bahwa baik kemerdekaan maupun kelahiran negara bangsa Indonesia merupakan peristiwa yang tidak berpreseden. Sebagaimana terlihat pula, negara dengan serta merta muncul sebagai sebuah entitas politik pada tingkat nasional yang bersifat *impersonal*; dan oleh karenanya cenderung menyatukan dan mengendalikan seluruh konstituennya berdasarkan rumusan "kepentingan nasional" demi mengatasi sentimen etnik dan kepentingan daerah.

Dalam konteks yang demikian, sesungguhnya negara dan konstituen etniknya berdiri di atas kerangka budaya politik yang berbeda. Negara, pada satu sisi tegak pada wacana supra-etnik dan budaya modern; dan oleh karenanya seluruh kebijakan negara cenderung berada di luar atau di atas sentimen etnik. Sementara itu, konstituen etniknya berada dalam garis lain yang dapat dikategorikan sebagai komunitas yang - mengutip Geertz - "*remain bound up in the gross actuality of blood, race, language, locality, religion and tradition*".²⁵

²⁵ Fachry Ali, "Bagaimana Negara Menghampiri Rakyat?" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi, *Op.Cit*, hal. 123

Diskrepensi struktural antara negara dan konstituen lokalnya menjadi semakin buruk ketika negara mengerahkan dorongan perluasan kekuasaannya. Baik secara teoritis maupun prakteknya, sekali sebuah negara lahir maka akan tidak dapat dihindarkan terjadinya keharusan struktural untuk menyerap dan mengendalikan konstituen pinggirannya. Negara bertindak sebagai aktor yang memusat dalam menguasai seluruh urusan pemerintahan pada semua bidang kehidupan berdasarkan kerangka dan struktur hierarkhis. Dengan kata lain, negara berperan sebagai *supra agent* dengan tugas utama menjaga kesatuan wilayah administratif dan teritorial secara terpusat, demi mencapai tujuan nasionalnya. Secara struktural, tugas ini menjadikan negara sebagai kekuatan dominan di atas konstituen etnik dan daerah yang pada akhirnya menimbulkan legitimasi kultural.

Latar belakang negara yang bersifat supra-etnik dan modern telah menyebabkan tabrakan dengan tradisionalisme sejumlah komunitas etnik. Ketika negara mengerahkan *aggrandizement impulse*-nya dengan memberlakukan nilai-nilai modern, negara tiba-tiba muncul sebagai sebuah entitas yang asing. Diskrepansi struktural dan budaya inilah yang sampai taraf tertentu menyebabkan timbulnya pemberontakan selama periode 1950-an sampai awal 1960-an. Naifnya, hal tersebut belum berakhir sampai saat ini, terbukti dengan semakin mengentalnya etno-nasionalisme pada berbagai komunitas etnik di Indonesia.

Dengan demikian ada dua hal yang dapat disimpulkan dari sejarah terbentuknya negara bangsa Indonesia ini, yaitu:²⁶ *pertama*, konsep *nation* seperti umumnya dipahami lewat definisi-definisi bangsa pada umumnya seperti kelompok orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang berbagi suatu bahasa yang sama, kesejarahan yang sama, agama yang sama, cara hidup yang sama, perasaan yang memiliki nasib yang sama dan perangkat ingatan sejarah serta aspirasi yang sama; tidaklah selalu tepat secara keseluruhan dalam konteks Indonesia. Faktanya adalah bahwa Indonesia dibentuk dari pluralitas kebangsaan. Suatu *state* yang terdiri dari *multi-nation*²⁷ - terdiri dari kelompok-kelompok etnis yang memiliki sejarah dengan

keterkaitan pada wilayah/tanah leluhur sendiri-, kecuali beberapa persamaan yaitu perasaan mempunyai musuh bersama. Indonesia bukanlah *polyethnic state* yang kelompok-kelompok etnis di dalamnya tidak menempati tanah leluhur.

Kedua, semangat sentimen kebangsaan (nasionalisme Indonesia) dan semangat loyalitas pada negara (patriotisme) adalah suatu proses "kesadaran yang sengaja ditumbuhkan", bukan suatu sentimen dan patriotisme yang sudah "*given*" serta mempunyai akar sejarah yang panjang dan jelas. Sentimen dan patriotisme yang mula-mula muncul lebih diarahkan pada daerahnya masing-masing berkenaan dengan keberadaan musuh (penjajah). Kalau pemahamannya adalah cara terakhir ini maka tidaklah mengherankan jika yang mengemuka adalah semangat kebangsaan dan patriotisme kedaerahan yang sudah berakar panjang dan bersifat primordial, atau apa yang dikenal dengan etno-nasionalisme itu.

Oleh karena itu, tantangan bangsa ini adalah bagaimana mentransformasi kesadaran baru kepada suatu identitas baru yang bernama "identitas nasional" dengan implikasi psikologis yang menyenangkan. Ketika proses pembentukan identitas, solidaritas sosial dan sentimen kebangsaan Indonesia terganggu, maka ketika itu pula semangat identitas dan loyalitas kebangsaan yang berbasiskan etnis muncul dan menuntut untuk bertransformasi menjadi suatu entitas politik pula (baca: negara baru).

Upaya transformasi tersebut - yang disebut juga sebagai proses *nation building* - bukanlah proses yang sekali jadi. Perasaan "kebangsaan" kemudian dipahami sebagai sebuah sistem sosial yang harus terus-menerus direproduksi. Giddens²⁸ menyatakan setidaknya ada empat institusi yang digunakan untuk reproduksi sistem sosial dalam konteks kenegaraan di atas. *Pertama*, mode-mode wacana atau tataran simbolik (S). *Kedua*, kekuasaan yang dibedakan menjadi dua macam: kekuasaan otoritatif (D(auth); yang disebutnya sebagai institusi politik dan kekuasaan alokatif (D(aloc.); yang disebutnya sebagai institusi ekonomi, dan institusi hukum atau mode-mode sanksi (L).

Indonesia mengerahkan semua institusi tersebut dalam reproduksi kebangsaannya, baik sebagai ideologi maupun sebagai

²⁶ KOMPAS, 22 November 2000

²⁷ KOMPAS, 20 Desember 2000

²⁸ Faruk dalam Th. Sumartana dkk (eds), *Op.Cit.*, hal. 71 - 72

sistem sosial. Politik wacana yang dibakukan, penataran P4 adalah indikator operasi institusi pertama. Panataan partai-partai politik, pemilu merupakan contoh institusi kedua. Operasionalisasi institusi ketiga dapat dilihat dari pemberian hak kepada orang atau sekelompok orang untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber-sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan pribadi atau pun bersama dan penetapan hubungan sekelompok orang tersebut dengan orang atau sekelompok orang subordinatnya. Semuanya dilakukan atas dasar "mandat" dan sekaligus di bawah perlindungan institusi hukum dengan seperangkat sanksinya.

Praktek-praktek kenegaraan yang dilakukan terus-menerus masih dipenuhi oleh simbol-simbol yang menjauhkan rasa kebersamaan sesama elemen bangsa. Simbol-simbol dari budaya etnis tertentu tampil secara dominan di pentas nasional, mengingkari keberadaan budaya etnis yang lain. Akibatnya, secara kultural, semakin banyak kelompok yang merasa tidak terwakili dalam "budaya nasional" yang terbentuk. Ini merupakan contoh bagaimana solidaritas emosional telah gagal dikelola secara efektif.

Solidaritas fungsional pun gagal ditumbuhkan. Otoritarianisme yang berlangsung selama puluhan tahun telah melahirkan berbagai ketimpangan; baik antar kota dan desa, antar-daerah, Jawa dan luar Jawa, maupun antara Indonesia Barat dan Timur. Yang tampil ke permukaan adalah sikap tamak, konspiratif, mementingkan keluarga dan atau golongannya sendiri. Keseluruhan proses ini telah berakibat timbulnya rasa keterbuangan pada banyak kelompok etnis sehingga tidak tercipta rasa keterkaitan fungsional antara satu kelompok dengan kelompok lain; antara satu etnis dengan etnis yang lain.

Dengan alasan untuk mempermudah administrasi pemerintahan, rezim yang berkuasa berusaha menyeragamkan sistem dan struktur yang ada di Pulau Jawa untuk diterapkan di seluruh pelosok negeri. Penyeragaman yang dilakukan disandingkan dengan pemberlakuan sentralisasi yang ketat. Sentralisasi meniscayakan peranan Pusat yang dominan, pun dalam bidang ekonomi. Hanya mereka yang tunduk pada Pusat, bisa kecipratan kue pembangunan. Politik sentralisasi ini telah mengakibatkan praktek ketidakadilan yang parah. Kekayaan daerah-daerah yang kaya, dikeruk habis-habisan. Ketidakadilan yang dirasakan puluhan tahun ini pada akhirnya

menimbulkan keinginan untuk berpisah dari Republik Indonesia. Oleh karenanya, sistem nasional yang diberlakukan telah menjadi salah satu faktor yang menghambat integrasi, karena ia sendiri belum berhasil melepaskan diri dari ikatan primordial.²⁹

Dengan politik pengelolaan seperti itu, dalam jangka pendek, pemerintah mendapatkan keuntungan yang besar dalam hal ini. Namun, cara tersebut dapat menikam balik terhadap dirinya sendiri karena hal itu sekaligus merupakan pemeliharaan dan bahkan penguatan ikatan primordial pada kelompok-kelompok sosial budaya yang ada. Dalam konteks Indonesia dengan latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam, yang pembangunan kebangsaannya lebih diakibatkan oleh adanya peristiwa aksidental yang berupa musuh bersama, kemungkinan terakhir di atas sungguh menjadi persoalan yang besar. Konflik antar-kelompok primordial yang berbasiskan etno-nasionalisme, tidak dapat dipahami sebagai sebuah konflik dengan dunia luar yang menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, ketika konflik antar-etnis muncul, pemerintah biasanya mengambil dua pilihan yang saling berhubungan satu sama lain : penciptaan konsep "penunggang"/provokator; adanya kekuatan eksternal yang menunggangi kekuatan internal; dibarengi pengerahan kekuatan militer - yang bersifat kekerasan - sehingga turut memperkuat cara-cara penyelesaian konflik dengan kekerasan antar-kelompok etnis yang terlibat konflik. Oleh karenanya, suasana konflik dipenuhi rasa takut, baik terhadap kekuatan militer maupun terhadap kemungkinan aksi kekerasan oleh kekuatan etnis tertentu yang dianggap dominan.

Berbagai ketidakadilan yang terjadi akibat pengelolaan negara yang cenderung sentralistis dengan segala implikasi negatifnya, telah mencuatkan wacana federalisme di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. Federalisme dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Negara yang bernama Indonesia tetap tegak berdiri dengan kesatuan wilayahnya yang utuh sebagaimana dalam bentuk negara kesatuan sekarang ini, tetapi dengan bentuk penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip-prinsip federalisme.

²⁹ Nazarudin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 45

Hal ini sejalan dengan salah satu model regulasi konflik etnis yang ditawarkan oleh Renner. Peredusiran konflik dilakukan dengan desentralisasi kekuasaan atau otonomi kultural. Negara harus membiarkan setiap etnis melaksanakan otonomi kultural, karena terbukti bahwa sentralisasi melahirkan penolakan yang kuat. Otonomi kultural ini akan berhasil dengan baik jika negara menganut sistem federasi.

Menurut Carl J. Friedrich,³⁰ federalisme merupakan proses penyatuan masyarakat politik. Dalam proses ini, jumlah masyarakat politik yang berbeda terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bersama dalam memecahkan persoalan bersama. Di samping itu juga, merupakan proses kesatuan masyarakat politik menjadi dideferensiasikan ke dalam susunan federal secara keseluruhan. Oleh karenanya, praktek federasi harus menjamin reproduksi suatu bentuk institusionalisasi politik yang merefleksikan dan mengakui adanya keragaman.

Namun demikian, alternatif regulasi konflik etnik yang ditawarkan Renner tersebut ditentang oleh Robert W Heffner.³¹ Ia menyatakan bahwa model yang dikembangkan oleh Renner ini akan gagal jika diterapkan di Indonesia yang mempunyai banyak etnis dengan tingkat kompleksitasnya yang demikian tinggi. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, penerapan sistem federal masih mendapat tantangan akibat kebijakan masa lalu yang banyak menolak ide-ide Barat. *Federalisme* menyimpan trauma untuk sebagian elite politik kita.³² Yakni masa lalu pengenalan negara serikat oleh Van Mook, yang memang ingin memecah-belah bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pengalaman pahit ini menghantui sampai saat ini. Tidaklah mengherankan jika ketika merebak wacana federalisme yang ditawarkan oleh satu partai politik baru, reaksi datang bertubi-tubi. Rupanya, berbagai kecaman yang muncul telah cukup efektif untuk mematikan wacana federalisme yang terbentuk.

Selain itu, federalisme bukan merupakan jaminan akan terhentinya konflik etnis dan terciptanya perdamaian sebab

pemahaman orang terhadap federalisme begitu sempit di mana sebuah negara bagian hanya boleh ditempati oleh etnis tertentu saja. Dengan kata lain, negara bagian akan cenderung menjadi negara suku. Yusril Ihza Mahendra³³ sangat mengkhawatirkan hal ini. Ia mengingatkan, kecuali Aceh dan Bali yang spesifik, pembentukan propinsi tidak dinamakan propinsi suku agar terhindar dari konflik antar etnis.

Dalam konteks ini, federalisme dapat dipahami sebagai proyek teritorial dalam masyarakat multi-etnis. Masyarakat etno-regional dianggap terwakili melalui kompartementalisasi spatial mereka (negara bagian), didasarkan atas keyakinan bahwa masyarakat etno-regional atau nasional harus memperoleh pengakuan yang pantas. Oleh karenanya, batas-batas negara bagian sama dengan batas-batas bahasa, etnis dan agama masyarakatnya.³⁴

Kedua; berbagai macam gerakan separatisme dalam kenyataannya - kecuali RMS (Maluku) dan OPM (Papua/Irian Jaya) - bukan dilandasi persamaan etnis, tetapi pada ideologi, seperti pemberontakan DI/TII, selain dimotivisir oleh motif-motif ekonomi, seperti kasus pemberontakan PRRI/Permesta.

Apabila ditinjau dari segi terbentuknya negara bangsa, berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu kurun waktu ketika banyak negara bangsa lahir di Asia - termasuk Indonesia - dan Afrika dengan semangat nasionalismenya di daerah-daerah bekas jajahan kolonial Barat. Seluruhnya menyanggah misi besar, sebagai instrumen untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Kenyataannya, terdapat perbedaan kualitatif yang jelas antara perjuangan mendirikan negara bangsa dengan mengoperasikan negara bangsa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Perjuangan mendirikan sebuah negara bangsa pada awalnya merupakan suatu gerakan protes, yang memerlukan agitasi dan propaganda; sedangkan mengoperasikan negara bangsa pada dasarnya merupakan penerapan manajemen pemerintahan yang harus mampu mengalokasikan sumber daya yang serba terbatas kepada berbagai etnis dan golongan yang menjadi rakyat negara tersebut.

³⁰ Carl J Friederich, *Trends of Federalism in Theory and Practice*, Frederick A. Praeger, New York, 1968, hal. 7 - 10.

³¹ *KOMPAS*, 29 Mei 2001.

³² Graham Smith, *Federalisme: Pilihan Masyarakat Majemuk*, Solidaritas Indonesia, Jakarta, 1999.

³³ Yusril Ihza Mahendra, "Perpolitikan Konsep Federal Di Indonesia dan Konsekuensinya," dalam Adnan Buyung Nasution dkk (eds), *Federalisme Untuk Indonesia*. Kompas, Jakarta, 1999, hal. 159

³⁴ Graham Smith, *Op.Cit*, hal. 11

Dalam konteks isu etno-nasionalisme ini, maka penerapan manajemen konflik yang tepat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan, konflik dalam kehidupan masyarakat didorong oleh perubahan, perbedaan, dan pluralitas yang bergerak dialektik. Manajemen konflik diperlukan agar proses dialektika berjalan wajar, terbuka, cerdas dan mencerahkan guna menemukan sintesa baru yang adil dan dapat diterima sebagai suatu keniscayaan sementara. Begitu seterusnya dan bentuk-bentuk sintesa baru selalu lahir serta memperkaya kehidupan masyarakat.

Dalam manajemen konflik tidak ada penolakan terhadap perubahan, perbedaan dan pluralitas kehidupan masyarakat, tetapi menjaga, mengelola dan mengarahkannya membentuk sintesa-sintesa baru. Karena itu, masyarakat harus mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendidik dirinya menjadi semakin dewasa dalam menghadapi dinamika perubahan, perbedaan dan pluralitas yang ada di dalam dirinya sendiri.

Oleh karenanya, jika sistem federasi di Indonesia masih pada level "pangandaian" yang harus menempuh prosesi *discourse* yang masih lama, maka kita perlu melakukan "pengandaian" yang lain, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan hari ini.

Salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah pihak yang memegang otoritas harus mempunyai "waktu" yang cukup untuk mengembangkan mekanisme yang demokratis dalam menghadapi dan memecahkan konflik, sehingga masyarakat dapat membudayakan manajemen konflik yang cerdas dan konstruktif.

Oleh karenanya, ada dua hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu; ³⁵ *pertama*, terus-menerus menumbuhkan "solidaritas emosional" dalam bingkai kebangsaan. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa dituntut untuk memiliki kemampuan "seni bercinta" yang baik, sehingga interaksi antar-etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk itu, perlu pemahaman budaya tiap-tiap kelompok etnis sehingga masing-masing kelompok memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termaginalisasi

bagi suatu kelompok etnis. *Kedua*, *nation building* harus terus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan "solidaritas fungsional" yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sistem pemerintahan yang sentralistis sedapat mungkin dihindarkan, karena akan merusak tumbuhnya solidaritas fungsional ini.

Penelusuran akar psikologis terhadap kemunculan fenomena etno-nasionalisme ini mutlak diperlukan. Jika ditelusuri, hasrat untuk hidup secara lebih bermartabat merupakan hakekat kekuatan pergerakan untuk memperoleh kemerdekaan dalam menentang berbagai bentuk pemerintahan yang represif; yang seringkali tercantum dalam pernyataan kemerdekaan suatu bangsa. Semangat itulah yang kemudian menjadi tolak ukur dari kinerja negara bangsa itu sendiri.

Ditinjau dari naluri manusiawi ini maka eksistensi negara bangsa akan lebih mantap jika naluri kemanusiaan dari warganya mendapatkan perhatian secara penuh yang tertuang dari kinerja pemerintah. Dengan memahami akar psikologis ini, maka *raison d'etre* etno-nasionalisme itu sudah dapat diselesaikan sejak dari taraf yang paling awal dan diberi tempat dalam keseluruhan kiprah negara nasional. Jika akar psikologis itu dapat disetujui, maka akan diperoleh kekenyalan dalam mencari solusi terhadap masalah etno-nasionalisme yang sudah muncul maupun dalam memahami bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Dengan strategi di atas maka kredibilitas negara akan meningkat di mata rakyatnya. Kredibilitas itu sendiri sebenarnya merupakan suatu hal yang dinamis, dalam arti dapat berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Sampai taraf tertentu, kredibilitas ini dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dari para elit lokal dan nasional. Formula politik apa pun tidak akan pernah terlaksana dengan sendirinya tanpa adanya para pemimpin yang berusaha mewujudkannya. Oleh karenanya, visi dan *style of leadership* turut berpengaruh terhadap pelaksanaan formula politik tersebut. Dengan demikian, hubungan pribadi yang erat antara para pemimpin akan banyak mempengaruhi dalam upaya menciptakan suasana saling percaya di kalangan elite.

Namun, ketergantungan terhadap kiprah para pemimpin harus secara perlahan-lahan dikurangi. Masyarakat harus bergerak ke arah

³⁵ KOMPAS, 20 Desember 2000

Dalam konteks isu etno-nasionalisme ini, maka penerapan manajemen konflik yang tepat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan, konflik dalam kehidupan masyarakat didorong oleh perubahan, perbedaan, dan pluralitas yang bergerak dialektik. Manajemen konflik diperlukan agar proses dialektika berjalan wajar, terbuka, cerdas dan mencerahkan guna menemukan sintesa baru yang adil dan dapat diterima sebagai suatu keniscayaan sementara. Begitu seterusnya dan bentuk-bentuk sintesa baru selalu lahir serta memperkaya kehidupan masyarakat.

Dalam manajemen konflik tidak ada penolakan terhadap perubahan, perbedaan dan pluralitas kehidupan masyarakat, tetapi menjaga, mengelola dan mengarahkannya membentuk sintesa-sintesa baru. Karena itu, masyarakat harus mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendidik dirinya menjadi semakin dewasa dalam menghadapi dinamika perubahan, perbedaan dan pluralitas yang ada di dalam dirinya sendiri.

Oleh karenanya, jika sistem federasi di Indonesia masih pada level "pangandaian" yang harus menempuh prosesi *discourse* yang masih lama, maka kita perlu melakukan "pengandaian" yang lain, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan hari ini.

Salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah pihak yang memegang otoritas harus mempunyai "waktu" yang cukup untuk mengembangkan mekanisme yang demokratis dalam menghadapi dan memecahkan konflik, sehingga masyarakat dapat membudayakan manajemen konflik yang cerdas dan konstruktif.

Oleh karenanya, ada dua hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu; ³⁵ *pertama*, terus-menerus menumbuhkan "solidaritas emosional" dalam bingkai kebangsaan. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa dituntut untuk memiliki kemampuan "seni bercinta" yang baik, sehingga interaksi antar-etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk itu, perlu pemahaman budaya tiap-tiap kelompok etnis sehingga masing-masing kelompok memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termarginalisasi

bagi suatu kelompok etnis. *Kedua*, *nation building* harus terus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan "solidaritas fungsional" yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sistem pemerintahan yang sentralistis sedapat mungkin dihindarkan, karena akan merusak tumbuhnya solidaritas fungsional ini.

Penelusuran akar psikologis terhadap kemunculan fenomena etno-nasionalisme ini mutlak diperlukan. Jika ditelusuri, hasrat untuk hidup secara lebih bermartabat merupakan hakekat kekuatan pergerakan untuk memperoleh kemerdekaan dalam menentang berbagai bentuk pemerintahan yang represif; yang seringkali tercantum dalam pernyataan kemerdekaan suatu bangsa. Semangat itulah yang kemudian menjadi tolak ukur dari kinerja negara bangsa itu sendiri.

Ditinjau dari naluri manusiawi ini maka eksistensi negara bangsa akan lebih mantap jika naluri kemanusiaan dari warganya mendapatkan perhatian secara penuh yang tertuang dari kinerja pemerintah. Dengan memahami akar psikologis ini, maka *raison d'etre* etno-nasionalisme itu sudah dapat diselesaikan sejak dari taraf yang paling awal dan diberi tempat dalam keseluruhan kiprah negara nasional. Jika akar psikologis itu dapat disetujui, maka akan diperoleh kekenyalan dalam mencari solusi terhadap masalah etno-nasionalisme yang sudah muncul maupun dalam memahami bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Dengan strategi di atas maka kredibilitas negara akan meningkat di mata rakyatnya. Kredibilitas itu sendiri sebenarnya merupakan suatu hal yang dinamis, dalam arti dapat berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Sampai taraf tertentu, kredibilitas ini dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dari para elit lokal dan nasional. Formula politik apa pun tidak akan pernah terlaksana dengan sendirinya tanpa adanya para pemimpin yang berusaha mewujudkannya. Oleh karenanya, *visi* dan *style of leadership* turut berpengaruh terhadap pelaksanaan formula politik tersebut. Dengan demikian, hubungan pribadi yang erat antara para pemimpin akan banyak mempengaruhi dalam upaya menciptakan suasana saling percaya di kalangan elite.

Namun, ketergantungan terhadap kiprah para pemimpin harus secara perlahan-lahan dikurangi. Masyarakat harus bergerak ke arah

³⁵ KOMPAS, 20 Desember 2000

yang lebih dewasa, memobilisir dirinya sendiri untuk berusaha sedapat mungkin menyelesaikan konflik yang timbul. Pembentukan lembaga dan atau kelompok-kelompok - formal maupun informal - yang menjalankan fungsi mediasi harus terus ditumbuhkan. Sinergi antara kedua belah pihak diharapkan akan mampu menghindarkan negara bangsa tercinta ini dari perpecahan yang tanda-tandanya sudah nampak di hadapan kita semua.

Daftar Pustaka

- Alfian, *Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Alfian, Ibrahim Teuku, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1999.
- Ali, Fachry, "Bagaimana Negara Menghampiri Rakyat?" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (ed), *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2000.
- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi (eds), *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2000.
- Bahar, Saafroedin, "Sumbangan Daerah Dalam Proses Nation Building", dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (eds), *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2000.
- Betts, Richard K. (ed), *Conflict After The Cold War: Argument on Causes of War and Peace*, Macmillan Publishing Company, New York, 1994.
- Castle, Lance, "Nasionalisme Kontemporer dan Relevansi Bagi Indonesia," dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi, *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2000.
- Faruk HT., "Imajinasi, Reimajinasi dan Deimajinasi: Soal Negara - Bangsa dan Kita," dalam TH. Sumartana (eds), *Nasionalisme*

- Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Friederich, Carl J, *Trends of Federalism in Theory and Practice*, Frederick A. Praeger, New York, 1968.
- Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (The End Of History and The Last Man)*, Penerjemah : Mohammad Husein Amrullah, Qalam, Yogyakarta, 2001.
- Gerung, Rocky Rocky Gerung, "Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme," dalam Th. Sumartana dkk (eds), *Nasionalisme Etnisitas : Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Horowitz, Donald L., *Ethnic Group in Conflict*, University of California Press, Los Angeles, 1985.
- Huntington, Samuel P., *Benturan Antar-Peradaban dan Politik Masa Depan Dunia, (The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order)*, Penerjemah M Sadat Ismail, Qalam, Yogyakarta, 2000.
- Isaacs, Harold R., *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis : Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Magill, Frank N. (ed), *International Encyclopedia of Government and Politics*, Toppan Company PTE LTD, Singapore, 1996.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Perpolitikan Konsep Federal Di Indonesia dan Konsekuensinya," dalam Adnan Buyung Nasution dkk (eds), *Federalisme Untuk Indonesia*. Kompas, Jakarta, 1999.
- Mas' oed, Mohtar, "Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini", dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (ed). *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Sjamsuddin, Nazarudin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Smith, Anthony D, *Theories of Nationalism*, Harper & Row Publisher, New York, 1971.

Smith, Graham (ed), *Federalisme: Pilihan Masyarakat Majemuk*, Solidaritas Indonesia, Jakarta, 1999.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1964.